

PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI MODAL SOSIAL PEMBANGUNAN

PENDAHULUAN

Dalam suatu pembangunan, modal sosial (*social capital*) adalah salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Peranan modal sosial, tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur ekonomi lainnya, sehingga upaya untuk membangun modal sosial perlu diprioritaskan demi kesuksesan pembangunan ekonomi. Pembentukan modal sosial dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi karena adanya jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) didalamnya yang menjadi kolaborasi (koordinasi dan kooperasi) sosial untuk kepentingan bersama.

Aspek kepercayaan atau *trust* merupakan unsur yang sangat esensial sekali di dalam membentuk modal sosial, oleh karena hal tersebut merupakan inti dari modal sosial (*core of social capital*). Negara kita sudah merasakan bagaimana lunturnya rasa kepercayaan antar komponen bangsa telah menyebabkan krisis multidimensional sampai saat ini. Terjadinya konflik horizontal yang bernuansa SARA seperti di Sampit, Ambon dan Poso, serta tingginya tingkat kriminalitas dan korupsi, sebagai bukti telah memudarnya rasa percaya antar warga. Akibat konflik yang berkepanjangan tersebut, ditambah lagi dengan semakin banyaknya permasalahan sosial yang bersifat patologis menyebabkan menurunnya kadar modal sosial dalam pembangunan.

Jika pembangunan ekonomi diinginkan tetap berlanjut maka hubungan, sikap dan pranata sosial dalam masyarakat harus diperbaiki. Pembangunan ekonomi harus bisa mengimbangi perubahan sosial yang terjadi, sehingga ketegangan sosial bisa dihindari. Upaya untuk memaksakan derap pembangunan yang terlalu cepat mungkin secara ekonomi akan sia-sia, karena perubahan kehidupan sosial belum terwujud, padahal perubahan tersebut diperlukan guna memungkinkan masyarakat mengadakan pembangunan yang diperlukan, sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan mendukung kelangsungan pembangunan ekonomi tersebut.



Orientasi ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan juga telah menumbuhkan mental pertumbuhan (*growth mentality*) yang membuat orang mengakumulasi materi sebanyak-banyaknya, dengan tidak memperdulikan orang lain yang sangat membutuhkan materi tersebut tetapi tidak bisa memperolehnya. Pola pikir (*mind-set*) orang berubah untuk mengejar dan mengakumulasi materi sebanyak-banyaknya, karena keyakinan bahwa materi yang banyak akan memberikan kepuasan hidup. Kondisi demikian ini akan membuat orang semakin berorientasi pada dirinya sendiri dan kurang memikirkan kesejahteraan orang lain, yang pada akhirnya akan menumbuhkan masalah sosial, serta kesenjangan ekonomi antara golongan atas dan golongan bawah semakin melebar.

Hanya masyarakat yang memiliki modal sosial yang dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi. Revitalisasi dan pengembangan modal sosial perlu dilakukan agar masyarakat mampu menggerakkan roda perekonomian. Modal sosial kalau dikelola dengan baik dan benar justru akan lebih mampu memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan kelembagaan (pranata) sosial ekonomi mutlak diperlukan dan mendesak guna mendukung pemenuhan modal sosial dalam pembangunan. Faktor kelembagaan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang hal itu memungkinkan adanya pembagian kerja yang lebih jauh, peningkatan pendapatan, perluasan usaha dan kebebasan untuk memperoleh peluang ekonomi.

Dalam kehidupan nyata, kelembagaan itu dapat menjadi peubah eksogen dalam proses pembangunan, dengan demikian kelembagaan dianggap sebagai penyebab segala perubahan pembangunan. Namun di pihak lain, kelembagaan bisa juga menjadi peubah endogen, dimana perubahan kelembagaan diakibatkan karena adanya perubahan-perubahan pada sistem sosial masyarakat yang ada. Karena itu akhirnya kelembagaan yang ada dalam masyarakat sudah mengalami dinamika perubahan berbagai zaman. Banyak lembaga-lembaga yang sudah hilang, tetapi banyak juga lembaga-lembaga baru yang bermunculan sesuai dengan iklim pembangunan.

Pembentukan kelembagaan dalam masyarakat tidak terlepas dari peranan individu, kelompok, atau pemerintah. Lembaga-lembaga yang hidup dalam masyarakat ada yang bersifat orisinil (kelembagaan informal) yang bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun, dan ada pula yang tercipta baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri (kelembagaan formal). Kelembagaan formal maupun informal tersebut sangat berperan sekali dalam pembangunan. Kedua lembaga ini selalu mempengaruhi berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan sering dijadikan sebagai *option* dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu apabila partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, maka penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat adalah merupakan suatu syarat pokok.

KONSEP MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

Munculnya konsep modal sosial dalam pembangunan ekonomi merupakan respon dari para ahli terhadap semakin berkurangnya hubungan sosial dalam masyarakat. Kerenggangan dalam kehidupan sosial pada akhirnya akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan sosial yang sangat mengganggu jalannya pembangunan. Oleh karena itu dalam upaya membangun sebuah bangsa yang kompetitif peranan modal sosial menjadi sangat penting.

Pengertian tentang modal sosial sangat bervariasi. Dalam berbagai literatur, kita akan menemukan banyak definisi tentang modal sosial. Demikian pula dengan unsur yang dimasukkan sangat beragam, ada yang memasukkan unsur jaringan (*networks*), norma (*norms*), kepercayaan (*trust*), sanksi (*sanctions*), dan lain-lain di dalam memfasilitasi komunitas secara kolektif. Brehm dan Rahn (1997) berpendapat bahwa modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Sementara Dasgupta dan Serageldin (2000), dan World Bank (2003) mengartikan modal sosial sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), hubungan (*relationships*) dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang membentuk kuantitas dan kualitas suatu interaksi sosial masyarakat.

Dasgupta dan Serageldin (2000) juga mengajukan hipotesa bahwa jaringan sosial (*social networks*) dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi karena di dalamnya mengandung *trust* yang merupakan elemen terpenting dalam jaringan. Pentingnya unsur *trust* ini dalam jaringan sosial juga dikemukakan oleh Fukuyama (1995), dalam hal ini ia lebih memfokuskan modal sosial tersebut terhadap *trust* sebagai faktor kunci mediasi untuk memperkecil *transaction cost* dalam *communities* dan *enterprises* yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara lebih efektif.

Dalam artikelnya, Szreter (1998) dalam INCIS (2003), mengemukakan bahwa modal sosial itu memfokuskan pada pentingnya hubungan (*relationship*) dalam urusan-urusan ekonomi. Lebih lanjut Szreter mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan, kota-kota, industri regional, dan ekonomi nasional dapat berfungsi secara lebih efisien jika terdapat penghormatan satu sama lain (*mutually respectful*) dan hubungan kepercayaan (*trusting relationship*) antara warga. Dari dua pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa pembentukan modal sosial dapat menyumbang pada pembangunan ekonomi karena adanya jaringan, norma, dan kepercayaan di dalamnya.

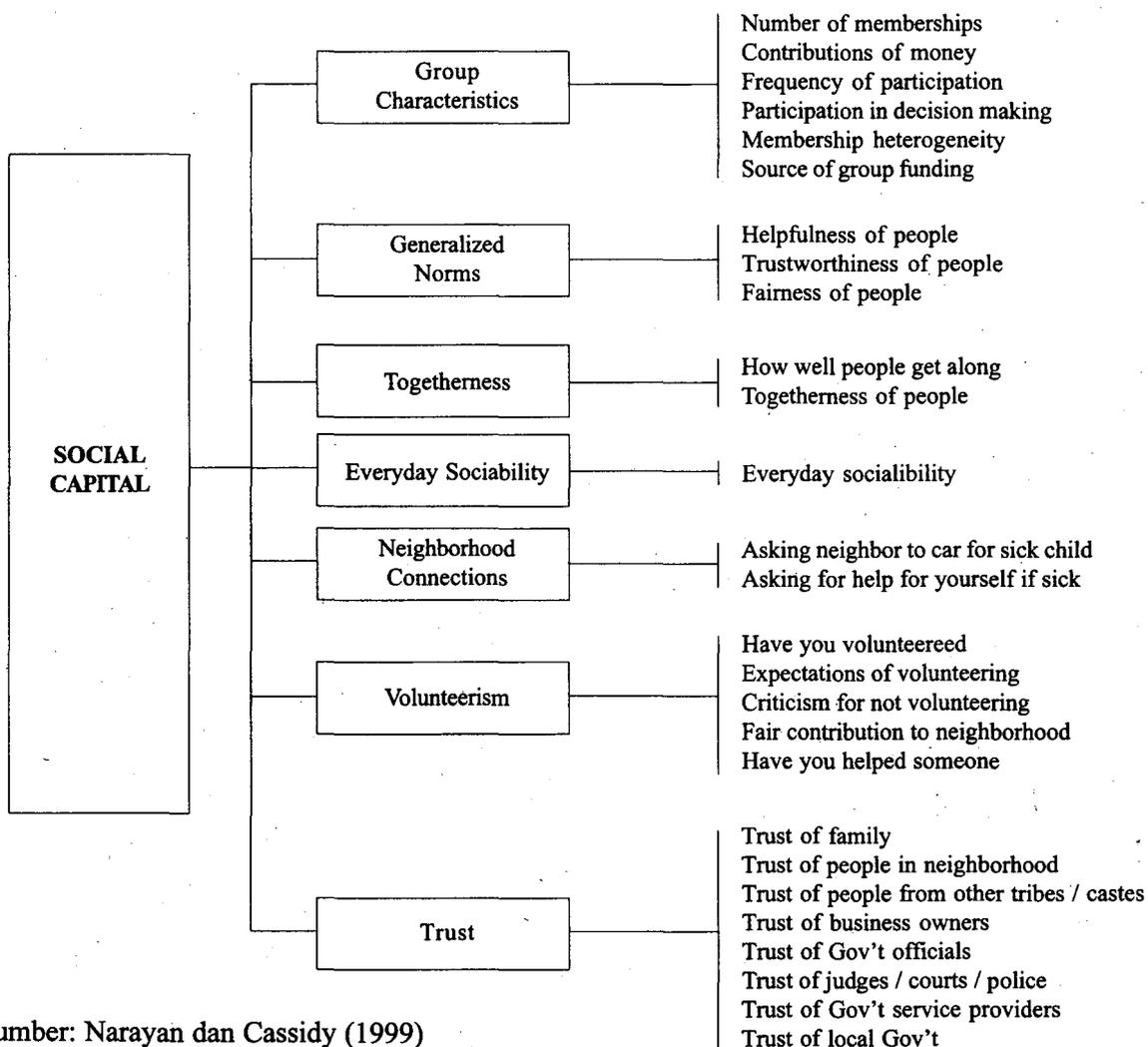
World Bank (2003) mengutarakan modal sosial itu sangat relevan bagi pembangunan ekonomi suatu negara, oleh karena modal sosial merupakan resep untuk menaikkan prospek ekonomi masyarakat dan bangsa, termasuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan secara berkompeten, dan akuntabilitas institusi politik. Selain itu pula modal sosial dapat memfasilitasi munculnya pasar bebas dalam perekonomian global. Adanya peningkatan pendidikan misalnya, telah menyebabkan masyarakat di negara maju lebih berkembang. Kemajuan pendidikan membawa mereka ke arah penalaran (*reasoning*) yang bisa menghasilkan berbagai inovasi baru, dan akhirnya memunculkan kelas ekonomi baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial ekonomi. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, berani mengambil risiko untuk mendapat keuntungan. Mereka juga mengembangkan hidup hemat dalam rangka memaksimalkan output berdasarkan input tertentu.

Putnam (1993) dalam Ancok (2003), telah menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi

sangat berkorelasi positif dengan kehadiran modal sosial. Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan baik apabila ciri-ciri berikut ini dimiliki oleh masyarakat, yaitu: (1) Hadirnya hubungan yang erat antar anggota masyarakatnya, (2) Adanya para pemimpin yang jujur dan egaliter yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat bukan sebagai penguasa, dan (3) Adanya rasa saling percaya dan kerjasama di antara unsur masyarakat. Putnam menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan di wilayah utara Italia berkorelasi dengan kehadiran ciri-ciri tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di wilayah Asia Timur disebabkan oleh adanya kegiatan ekonomi yang bertumpu pada penumbuhan modal sosial. Kemajuan negara Cina dalam bidang ekonomi digambarkan oleh Putnam sebagai akibat dari penerapan konsep ekonomi yang berdasarkan jaringan sosial, khususnya jaringan sosial bisnis antar sesama masyarakat dalam negeri dan masyarakat cina perantauan (*overseas chinese*).

Pengembangan ekonomi pedesaan (*village economy*) dalam sebuah sinergi antar satu kegiatan ekonomi di suatu desa dengan desa yang lainnya telah membangkitkan pertumbuhan ekonomi negara Cina.

Mengukur modal sosial dalam suatu pembangunan kelihatannya sangat sulit, tapi bukan berarti hal itu tidak mungkin dapat dilakukan. Narayan dan Cassidy (1999) telah menyampaikan beberapa indikatornya. Dengan melakukan kombinasi dari berbagai metodologi kuantitatif dan kualitatif kita akan bisa menemukan seberapa jauh modal sosial tersebut tersedia dalam pembangunan. Dalam hal ini Narayan dan Cassidy (1999), menyajikan ukuran modal sosial dalam komunitas masyarakat dengan membaginya kedalam tujuh kelompok besar yaitu: (1) *Group Characteristics*, (2) *Generalized Norms*, (3) *Togetherness*, (4) *Everyday Sociability*, (5) *Neighborhood Connections*, (6) *Volunteerism*, dan (7) *Trust*, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Narayan dan Cassidy (1999)
Gambar 1: Measuring Social Capital in Communities

Semua ahli sepakat bahwa untuk membangun modal sosial harus dimulai dari pendidikan dalam keluarga dan sekolah. Namun tidak kalah pentingnya lagi adalah melalui berbagai pelatihan kelompok untuk membangun visi dan misi bersama, serta menumbuhkan saling percaya. Cara yang kedua ini tampaknya lebih efektif didalam membangun modal sosial. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa belajar bersama dalam kelompok (*learning group*) dapat meningkatkan hasil kerja kelompok dan perasaan menyatu dalam organisasi. Kilpatrick (2002) telah melakukan simulasi bagaimana membangun modal sosial pada keluarga usaha tani di Australia melalui program pelatihan secara reguler. Hasilnya menunjukkan bahwa pelatihan secara kelompok tersebut sangat positif secara ekonomi. Mereka mau dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Setiap anggota kelompok mampu mengkombinasikan antara pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang bisa menciptakan usaha tani yang lebih baik lagi. Demikian pula Ancok (2003), yang melakukan observasi terhadap dampak *Leadership Development Program* di PT. Caltex Pacific Indonesia menunjukkan adanya penguatan modal sosial. Sesama anggota perusahaan merasa lebih akrab dan melihat orang lain sebagai bagian dari sukses perusahaan.

Selain pendidikan, modal sosial bisa pula dibangun melalui ikatan hubungan kemasyarakatan. Dalam konteks ini Bourdieu (1970) berpendapat

bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (misalnya paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu, dan lain-lain). Selanjutnya Coleman (1988) mengatakan juga bahwa modal sosial adalah sumber daya yang lahir dari kumpulan suatu ikatan sosial tertentu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa modal sosial berbeda dengan aset finansial yang dapat diperoleh dari kredit bank, dan aset sumber daya manusia yang dapat diperoleh dari intelektualitasnya, maka modal sosial hanya dapat diperoleh dan diciptakan dari relasi antar manusia. Modal sosial ini juga yang melahirkan kontrak sosial dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Pendapat lainnya diungkapkan oleh Peterson et al. (2002). Dikatakannya bahwa pembangunan modal sosial dapat dilihat dari tiga tipe, yaitu : (1) *Direct social capital, created by repeated direct transactions between two transaction partners*, (2) *Indirect social capital, created by the reputation of each transaction partner in direct transactions with others*, dan (3) *Identity-based social capital, created by each transaction partner's association with broader norms, values, or characteristics shared or held because of group memberships not related to the direct transaction*. Ketiga tipe tersebut masing-masing mempunyai karakteristik seperti yang diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1: *Characteristics of Social Capital Types*

<i>Characteristic</i>	<i>Direct</i>	<i>Indirect</i>	<i>Identity-based</i>
<i>Foundation for trust between partners</i>	<i>Direct transaction experience</i>	<i>Reputation for trust relationships with others</i>	<i>Identification with or adherence to certain norms, values, or traits</i>
<i>Usefulness in initial contacts</i>	<i>Limited (built only through repeated experience)</i>	<i>High to moderate (reputation either exists or not; time needed to signal and verify)</i>	<i>High (partner tends to have or not have the desired identity characteristics)</i>
<i>Usefulness in continuing Relationships</i>	<i>High</i>	<i>Limited (direct experience replaces)</i>	<i>Limited to moderate (persists if direct experience reinforces presence of identity characteristics)</i>
<i>Actions that develop and maintain social capital</i>	<i>Forego opportunism Express commonality and personal concern Establish personal / social interactions</i>	<i>Forego opportunism Signal reputation (e.g., references) and act consistently with it</i>	<i>Forego opportunism Adhere to expected behavior based on identity characteristics</i>

Sumber: Peterson, et al. (2002)

POTENSI DAN PERUBAHAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Selama ini masih banyak pakar ekonomi yang beranggapan bahwa mekanisme pasar sebagai satu-satunya problem solver untuk segenap masalah dalam pembangunan ekonomi, dan mengabaikan peranan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Hal tersebut dinilai North (1990) keliru, sebab peran kelembagaan, baik itu kelembagaan sosial, ekonomi dan politik, tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi. North mengatakan pula bahwa reformasi secara radikal dalam tatanan perekonomian suatu negara tidak akan memberikan hasil yang nyata, hanya dengan memperbaiki kebijakan makroekonomi belaka. Agar reformasi berhasil dibutuhkan dukungan seperangkat kelembagaan yang mampu memberi insentif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Lebih jauh lagi, Blakely (1994) mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan suatu proses pembentukan kelembagaan (*institution building*). Dengan demikian pembangunan ekonomi memerlukan kelembagaan dan sistem perencanaan yang mampu mengelola proses pembangunan sepanjang waktu. Oleh karenanya, struktur organisasi pembangunan sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat.

Aspek kelembagaan telah merasuk cukup jauh dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat akan selalu hidup dalam bentuk dan dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu. Kelembagaan merupakan *rule of the game* dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, atau secara lebih formal merupakan aturan yang membatasi dan membentuk interaksi manusia. Selain itu kelembagaan juga merupakan aturan prosedur yang menentukan bagaimana manusia bertindak, dan atau berperan secara organisatoris yang bertujuan untuk memperoleh status atau legitimasi tertentu. Oleh karena itu kelembagaan merupakan suatu sistem organisasi dan kontrol masyarakat terhadap penggunaan sumberdaya.

Veblen sebagai tokoh utama aliran kelembagaan lebih mengartikan kelembagaan tersebut kepada norma-norma, nilai-nilai, tradisi dan budaya (Deliarnov, 2003). Tapi bagi North kelembagaan itu adalah peraturan perundang-undangan berikut sifat-sifat pemaksaan dari peraturan-peraturan tersebut serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia

secara berulang-ulang (Deliarnov, 2003). Dalam hal ini North tidak melihat kelembagaan sebagai institusi, tetapi terutama kepada konsekuensi kelembagaan tersebut atas pilihan-pilihan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. North memberikan resep bagi negara-negara yang ingin maju harus dikembangkan sistem kontrak, hak cipta merek dagang dan sebagainya secara resmi, yang dilengkapi dengan sistem pemantauan dan mekanisme penindakan bagi para pelanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat. Tanpa kehadiran suatu kelembagaan maka *transaction cost* dalam aktifitas ekonomi menjadi tinggi. Kehadiran kelembagaan sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan ekonomi pasar.

Menurut Goldsmith dan Brikenhoff (1991), kelembagaan itu merupakan aturan prosedur yang menentukan bagaimana manusia bertindak, dan atau peranan organisasi yang bertujuan untuk memperoleh status atau legitimasi tertentu. Peraturan dan peran dapat dilembagakan, sebagai peraturan atau perundang-undangan dan sebagai organisasi yang kongkrit. Sebagai organisasi, kelembagaan diartikan sebagai wujud kongkrit yang membungkus aturan main tersebut seperti yang dilakukan pemerintah, bank, koperasi, pendidikan, tataniaga dan sebagainya. Batasan tersebut menunjukkan bahwa organisasi dapat dipandang sebagai perangkat keras dari kelembagaan, sedangkan aturan main merupakan perangkat lunak.

Pendekatan kelembagaan dalam pembangunan di Indonesia saat ini sudah mendapat perhatian yang serius, dan menjadi isu sentral pembangunan yang sangat esensial dalam rangka mendorong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Telah banyak kelembagaan lokal, regional, dan nasional terbentuk, baik itu secara formal maupun informal. Terlebih lagi di daerah perdesaan, banyak terlihat berbagai macam bentuk kelembagaan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi perdesaan seperti Bimas, KUD, KUT, dan sebagainya. Maupun kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan aktifitas kehidupan sosial masyarakat, misalnya karang taruna, forum RT/RW, gotong royong, dan lain-lain.

Masing-masing kelembagaan masyarakat di atas mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan secara global dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Kelembagaan masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi keperluan hidup kekerabatan sering disebut lembaga kekerabatan (*kindship institution*). Contohnya lembaga adat, lembaga perkawinan, kelompok kerukunan keluarga suatu suku, dan sebagainya.
2. Kelembagaan masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan aktifitas ekonomi, seperti produksi, permodalan, dan pemasaran, semuanya ini disebut dengan lembaga ekonomi (*economic institution*). Contohnya Bimas, KUD, kelompok tani, lumbung padi, subak, dan lain-lain.
3. Kelembagaan masyarakat yang berfungsi memenuhi kebutuhan manusia dalam distribusi kekuasaan dan wewenang mengatur masyarakat disebut lembaga politik (*political institution*). Contohnya pemerintahan desa dan BPMD (Badan Perwakilan Masyarakat Desa).
4. Lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti lembaga pendidikan (sekolah), lembaga pelayanan kesehatan (Puskesmas), lembaga keamanan desa (Siskamling), dan lain-lain.

Seperti halnya unsur kemasyarakatan lainnya, lembaga sosial ekonomi masyarakat juga selalu mengalami perubahan. Bagi Jhingan (1993), perubahan kelembagaan itu adalah revolusi sosial, namun dengan arti tidak mengandung penggulingan pranata yang ada. Proses perubahannya haruslah bersifat evolusioner. Sehingga ketidakpuasan, frustrasi, ketidaktentraman, dan kekerasan tidak mencuat. Kalau semua hal itu muncul malah bisa merintangai pertumbuhan ekonomi.

Jika suatu perubahan bermula dari kelembagaan sosial, masyarakat akan memperoleh kesempatan baru yang pada gilirannya akan melanjutkan perubahan kelembagaan tersebut. Kesempatan baru yang dimaksud dapat terjadi melalui cara, misalnya, penemuan baru dapat menciptakan komoditi baru atau mengurangi biaya produksi. Jalur transportasi baru akan meningkatkan dan membuka perdagangan baru. Inflasi dapat menciptakan permintaan baru. Kesempatan-kesempatan baru semacam itulah yang akan membawa perubahan di bidang kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Dengan kata lain kelembagaan mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sumberdaya biologis, kebutuhan dan preferensi masyarakat. Namun demikian, sebaliknya dengan adanya kelembagaan bisa pula mempengaruhi arah

maupun perkembangan teknologi. Contohnya di Indonesia, setelah mendirikan BIMAS, lembaga penyuluhan, sistem perkreditan, pemasaran, dan lain-lain akhirnya mendukung lahirnya teknologi penggunaan varietas unggul padi yang bisa meningkatkan produksi pangan.

Meskipun perubahan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat itu merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi, akan tetapi harus tetap dikontrol dan dijaga jangan sampai perubahan kelembagaan tersebut malah menyebabkan kerugian pada masyarakat. Misalnya akibat kemajuan teknologi mengakibatkan kelembagaan distribusi pendapatan bertambah timpang, perubahan kelembagaan keluarga yang semakin mengabaikan norma-norma agama, hilangnya kelembagaan adat, dan sebagainya. Oleh karena itu peranan pemerintah disini sangat besar sekali untuk menyediakan berbagai overhead social-economic yang dapat menjamin dan mengarahkan perubahan kelembagaan masyarakat dengan lebih benar dan tepat.

POLA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Menyimak potensi kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sebagai modal sosial pembangunan itu sangat luas dan fleksibel terhadap berbagai perubahan, maka pola pengembangan kelembagaan masyarakat agar semakin kuat perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya:

(a) Perbaikan Struktur dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan masyarakat ini adalah merupakan kolaborasi dari interaksi sosial ekonomi pada suatu komunitas untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu harus dibuat suatu perekat yang dapat menyatukan masyarakat, pemerintah dan LSM, yang dapat dilakukan melalui pengaturan struktur dan fungsi kelembagaan sedemikian rupa sehingga mampu memobilisasi semua *stakeholder* baik yang berasal dari dalam maupun luar, tanpa ada satupun yang merasa dirugikan. Delegasi dari semua pihak harus terwakili dalam struktur kelembagaan, baik itu dilihat secara hirarki maupun departementasi struktur yang dibuat sesederhana mungkin.

(b) Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang Berimbang

Kemajuan informasi dan teknologi (IT) telah banyak mengubah kehidupan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Terutama sekali dengan adanya pembangunan *overhead social-economic* (jalan raya, telekomunikasi, dan pelabuhan) menyebabkan arus perdagangan semakin lancar dan mudah menjangkau konsumen, khususnya untuk komoditi-komoditi pertanian. Namun demikian, kemajuan IT tersebut ternyata belum terserap secara berimbang. Hal ini ditandai dengan penerimaan informasi pasar yang masih asimetrik oleh petani. Akibatnya petani sampai sekarang selalu dirugikan, oleh karena mereka terpaksa harus memilih kelembagaan tata niaga yang dibuat oleh pedagang (besar dan pengumpul), yang sudah tentu tata niaga yang dibuat mereka akan selalu lebih menguntungkan. Untuk menjembatani hal diatas, maka perlu diupayakan peningkatan jangkauan IT sampai kepada masyarakat perdesaan. Lembaga-lembaga informasi desa misalnya perlu didukung dengan seperangkat *hardware* yang bisa membuka dan menjangkau akses ke dalam pasar, sehingga informasi perkembangan pasar dapat diperoleh secepatnya.

(c) Peningkatan Program-Program Pendidikan dan Pelatihan Secara Berkelompok

Program pendidikan kita saat ini pada umumnya sangat bersifat individual, dan kurang menekankan pada belajar kelompok. Jika hal ini dibiarkan, dikawatirkan di kemudian hari peran serta masyarakat di dalam membangun modal sosial tidak akan efektif. Modal sosial itu seharusnya muncul dari hasil kerjasama antar individu. Oleh karena itu, pembentukan modal sosial hanya bisa dilakukan dengan efektif apabila melibatkan sejumlah orang yang bekerjasama dalam sebuah kelompok. Pola-pola pelatihan seperti *outbound management training* (pelatihan di alam terbuka) telah menunjukkan bahwa kerjasama kelompok dan antar kelompok semakin meningkat pada berbagai organisasi yang menggunakan metode tersebut.

(d) Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aktifitas Kelembagaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan peranan atau tugas kelembagaan sangat diperlukan beberapa sarana dasar. Sarana ini merupakan pusat-pusat aktivitas sosial ekonomi dalam suatu

komunitas. Pembangunan sarana dasar ini bukan hanya diartikan secara sempit saja, tetapi juga memuat bagaimana menumbuhkan hasrat masyarakat untuk memanfaatkan segala fasilitas yang telah dibangun tersebut. Pendirian KUD, Puskemas, sekolah, dan pasar akan menjadi sia-sia bila masyarakat tidak mau memanfaatkannya. Demikian pula penyediaan sarana tanpa didukung prasarannya juga membuat pembangunannya menjadi mubazir. Tanpa adanya tenaga kesehatan dan guru yang memadai misalnya, sudah tentu akan mematikan aktifitas kelembagaan sosial tersebut.

(e) Memberdayakan dan Memfasilitasi Kelembagaan Masyarakat Informal

Adanya kemajuan pembangunan ekonomi jangan sampai mematikan kehidupan lembaga-lembaga sosial ekonomi informal yang telah terbentuk lama secara turun temurun. Oleh karena keberadaan lembaga-lembaga tersebut semakin menambah akumulasi modal sosial dalam pembangunan. Terlebih lagi bila aktifitas kelembagaan informal itu dapat diberdayakan dan difasilitasi maka jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan dalam interaksi komunitas akan semakin tumbuh, yang pada akhirnya bisa meningkatkan modal sosial dalam pembangunan.

(f) Menciptakan Pemimpin Kelembagaan yang Transformasional

Adanya perkembangan globalisasi ekonomi yang makin nyata, kondisi di berbagai pasar dunia ditandai dengan kompetisi yang sangat tinggi. Oleh karena itu seorang pemimpin harus mampu mentransformasi terus menerus seluruh aspek manajemen kelembagaannya agar selalu relevan dengan kondisi persaingan baru. Pemimpin transformasional dianggap sebagai model pemimpin yang tepat untuk terus menerus meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan inovasi guna menaikkan daya saing.

KESIMPULAN

Peranan modal sosial dalam pembangunan ekonomi tidak kalah pentingnya dengan infrastruktur ekonomi lainnya. Telah dibuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat berkorelasi positif dengan modal sosial. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di wilayah Asia Timur disebabkan oleh

adanya kegiatan ekonomi yang bertumpu pada penumbuhan modal sosial. Kemajuan negara Cina dalam bidang ekonomi juga digambarkan sebagai akibat dari penerapan konsep ekonomi yang berdasarkan jaringan sosial, khususnya jaringan sosial bisnis antar sesama masyarakat dalam negeri dan masyarakat cina perantauan (*overseas chinese*). Selain itu, World Bank sejak tahun 1994 mensponsori pengembangan kajian modal sosial (*social capital initiative*) di negara-negara berkembang dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Modal sosial bila dikelola dengan baik dan benar akan lebih mampu memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan kelembagaan (pranata) sosial ekonomi baik itu yang bersifat formal maupun informal mutlak dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan modal sosial dalam pembangunan. Untuk hal itu perlu dilakukan upaya selalu memperkuat kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan, dimana untuk menciptakan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara: (a) Perbaikan struktur dan fungsi kelembagaan masyarakat, (b) Pemanfaatan informasi dan teknologi yang berimbang, (c) Peningkatan program-program pendidikan dan pelatihan secara berkelompok, (d) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana aktifitas kelembagaan, (e) Memberdayakan dan memfasilitasi kelembagaan masyarakat informal, dan (f) Menciptakan pemimpin kelembagaan yang transformasional.

REFERENSI

Ancok, J. 2003. Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Blakely, E.J. 1994. *Planning Local Development: Theory and Practice*, 2nd Edition, Sage Publication, California.

Brehm, J, dan Rahn, W. 1997. Individual-level evidence for the cause and consequences of social capital. *American Journal of Political Science* 41: 999-1023.

Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital *American Journal of Sociology*, 94, Supplement, S95-120.

Dasgupta, P, dan Serageldin, I. 2000. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. The World Bank, Washington, DC.

Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press, New York.

Goldsmith, A.A, dan Brinkerhoff, D.W. 1990. *Sustainability and Rural Agricultural Development*, In *Institutional Sustainability Agricultural and Development*, Global Perspective. Praeger Publisher, New York.

INCIS (Indonesian Institute for Civil Society). 2003. *Riset Pembentukan dan Penguatan Civil Society di Indonesia: Studi Kasus Jakarta*. INCIS, Jakarta

Jhingan, M.L. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kilpatrick, S. 2002. *Learning and Building Social Capital in a Community of Family Farm Business*. CRLRA Discussion Paper Series ISSN 1440-480X. University of Tasmania.

Narayan, D, dan Cassidy, M. 1999. "A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory". The World Bank, Washington, DC.

North, D.C. 1990. *Institution, Institutional Change, Economic Performance*. Cambridge University Press, Cambridge.

Putnam, R. 1995. Tuning in, tuning out: the strange disappearance of social capital in America. *Political Science and Politics*, December: 664-683.

Woolcock, M. 1998. Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society* 27(2):151-208.

World Bank. 2003. *Social Capital*. Download dari <http://www.worldbank.org/poverty/scapital>